

DEFINISI, KRITERIA, DAN EVOLUSI KONSEP SEKTOR INFORMAL: SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK REPELITA IV

HIDAYAT*

PENDAHULUAN

Menjelang memasuki tahapan Repelita IV perhatian di kalangan para perencana dan pemerhati pembangunan perihal pembinaan dan pengembangan Sektor Informal menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Bagi penulis makalah ini yang sejak tahun 1976 secara aktif memperhatikan sektor tersebut, mula-mula sebagai peneliti dan kemudian menjadi pemerhati yang setia, maka gejala proses peningkatan perhatian terhadap Sektor Informal mempunyai arti bahwa di kalangan masyarakat luas sudah ada semacam *pengakuan* bahwa sektor tersebut benar-benar mempunyai peranan sosial dan ekonomis yang cukup strategis dalam pola pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu sudah waktunya bahwa sektor tersebut mulai dalam Repelita IV yang akan datang diberi peranan yang lebih jelas serta mendapat dukungan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan sumbangsinya terhadap pembentukan GDP dan kesempatan kerja. Tidak begitu salah kalau dikatakan bahwa salah satu fungsi yang menonjol yang dibawakan oleh Sektor Informal dalam perekonomian Indonesia ialah kemampuannya untuk melakukan fungsi sebagai "employer of last resort" (penyedia tempat kerja terakhir setelah sektor lain tidak dapat menampung pencari kerja).

Angka empiris perihal daya absorpsi kesempatan kerja selama dasawarsa 1970-an yang lalu menunjukkan bahwa jumlah terbesar dari pencari kerja pertama kali yang mencari pekerjaan akhirnya memperoleh pekerjaan di Sektor Informal. Dalam periode itu ada sekitar 14 juta orang yang pertama kali masuk pasar kerja (new entrants). Berdasarkan perkiraan proyeksi bahwa dalam dasawarsa 1980-an ada sekitar 20 juta orang yang akan memasuki pasar kerja untuk pertama kalinya, maka tidak begitu salah kalau diduga bahwa sebagian

*Penulis adalah Direktur, Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, Universitas Pajajaran.

PENUTUP

Dari uraian tersebut terlihat, bahwa masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah pengangguran di Indonesia, sangat kompleks dan jalin-menjalin dengan berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu dalam penyusunan Repelita IV mendatang perlu perumusan strategi pembangunan yang menyeluruh, yang di dalamnya juga terkandung perumusan strategi penempatan tenaga kerja secara penuh. Perumusan strategi pembangunan secara demikian, diharapkan dapat melahirkan pengelolaan tenaga kerja secara terpadu, baik mengenai perencanaan dan pengorganisasiannya maupun pelaksanaan dan pengawasannya.

Pengelolaan tenaga kerja secara terpadu tersebut kiranya dapat diwujudkan dengan memberikan bobot yang jelas dan tegas pada kelembagaan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, terutama Bappenas, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Biro Pusat Statistik. Sesuai dengan fungsi kelembagaannya, Bappenas bertanggung jawab dalam proses perumusan strategi pembangunan nasional, yang di dalamnya telah terkandung perumusan strategi dan perencanaan penempatan tenaga kerja secara penuh. Pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing di bawah koordinasi Departemen Tenaga Kerja. Pemberian bobot yang jelas dan tegas kepada Departemen Tenaga Kerja secara demikian dimaksudkan agar departemen itu lebih fungsional dan benar-benar bertanggung jawab terhadap seluruh masalah ketenagakerjaan.

Mekanisme kerja itu kiranya akan lebih fungsional jika semua pihak mampu menghilangkan hambatan-hambatan birokratis, antara lain dengan menciptakan hubungan kerja dan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga lainnya. Misalnya pentingnya kerja sama antara Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kerja dan untuk memperoleh data tentang pendidikan tenaga kerja yang tersedia. Kerja sama dengan Biro Pusat Statistik, yang berfungsi sebagai "bank data," untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tenaga kerja, seperti data harga barang-barang kebutuhan pokok untuk menentukan kebijakan upah yang layak. Serta kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mengetahui kesempatan kerja dan lapangan kerja yang terbuka pada sektor-sektor yang berada dalam wewenangnya. Di samping sebagai penanggung jawab pelaksanaan rencana ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja juga menjalankan fungsi pengawasan tenaga kerja, antara lain dengan mengikuti perkembangan situasi ketenagakerjaan sehari-hari. Jika mekanisme ini berjalan baik, diharapkan Departemen Tenaga Kerja dapat menjadi "Pusat Informasi Tenaga Kerja" dan sekaligus juga merupakan pe-

mungkin sebagian besar jumlah tenaga kerjanya merupakan pedagang kecil, eceran, kaki lima dan penunggu pertokoan, sehingga produktivitas kerjanya pun diperkirakan sangat rendah. Untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja di lapangan-lapangan usaha itu kiranya perlu dilakukan peningkatan penanaman modal. Tetapi penanaman modal itu hendaknya tidak hanya untuk mencapai laju pertumbuhan lapangan-lapangan usaha belaka, melainkan harus selalu dikaitkan dengan upaya perluasan lapangan kerjanya. Hal itu berarti bahwa seluruh lapangan usaha itu harus berorientasi padat karya. Orientasi usaha yang padat karya itu tidaklah berarti menutup kemungkinan usaha padat modal, tetapi usaha itu seharusnya mampu mendorong proses produksi kelanjutannya, misalnya proyek-proyek "hulu" yang hasilnya dapat dikembangkan lebih lanjut di bagian "hilir." Sekalipun usaha itu padat modal, tetapi secara tidak langsung justru mampu merangsang penciptaan lapangan kerja secara luas.¹

Upaya-upaya perluasan lapangan kerja itu kiranya perlu dibarengi upaya-upaya pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerjanya, sehingga setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan kerja pada lapangan-lapangan kerja yang tersedia, bahkan mampu menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Rendahnya produktivitas tiap tenaga kerja, lambannya pertumbuhan lapangan usaha dan masih memusatnya penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian, besar kemungkinannya karena sebagian besar tenaga kerjanya tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan (lihat Tabel 2, 3, 6, 2 dan 5). Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebagian besar jumlah angkatan kerja hanya berpendidikan rendah, yaitu yang tidak tamat SD (tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD) mencapai 66,98% dan yang tamat SD 21,25%. Di samping itu juga terlihat, bahwa jumlah angkatan kerja yang tamat sekolah kejuruan sangat kecil dibandingkan yang tamat sekolah umum. Hal itu menunjukkan bahwa selama ini upaya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja dengan peningkatan pendidikan tenaga kerja kurang saling menunjang.

Ketimpangan pendidikan tenaga kerja itu tampaknya telah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam GBHN, ditegaskan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja. Untuk itu perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan secara fungsional dan terintegrasi bidang pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka tercapainya suatu sistem pembinaan pendidikan secara nasional, mantap dan terpadu. Sebagai realisasi dari ketentuan itu, kini sudah tiba saatnya untuk meninjau kembali

¹Lihat R.B. Suhartono, "Pola dan Struktur Industri Indonesia," di dalam *Industrialisasi dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: CSIS, 1982), hal. 23 dan seterusnya.

BEBERAPA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Masalah pengangguran merupakan bagian dari masalah ketenagakerjaan, yakni berkaitan erat dengan masalah kesempatan kerja, lapangan kerja, pen-dayagunaan tenaga kerja dan aspirasi tenaga kerja. Oleh karena itu penang-gulungannya perlu dilakukan secara menyeluruh dengan berpijak pada sendi-sendi dasar kenegaraan kita. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain ditegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan pada Pancasila. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, terutama "untuk memajukan kesejahteraan umum," negara wajib mengusahakan agar setiap warga negara Indonesia dapat melaksanakan hak asasinya. Bagaimanapun manusia tidak mungkin hidup sejahtera tanpa mempunyai pekerjaan yang tetap. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi belaka, melainkan juga nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang kesempatan kerja merupakan satu-satunya sumber kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Cita-cita negara-bangsa Indonesia itu, terutama agar usaha penciptaan hak akan pekerjaan menjadi berbarengan dengan hak mendapat pekerjaan, peluang tercapainya yang paling besar adalah melalui pembangunan. Dalam GBHN 1983, antara lain ditegaskan bahwa: (1) pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila; (2) hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia; (3) dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar, maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, antara lain dengan mengutamakan pembangunan yang meningkatkan perluasan lapangan kerja; (4) perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak, oleh karena itu perlu lebih dimantapkan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu untuk mendorong perluasan kesempatan kerja, baik yang bersifat umum, sektoral, regional maupun langkah-langkah yang bersifat khusus. Lebih jauh, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, dinyatakan bahwa pemerintah mengatur penyediaan, penyebaran dan penggunaan tenaga kerja secara penuh dengan menggunakan prinsip "tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat."

Masih memusatnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan masalah yang serius, karena lahan pertanian yang diolah tidak mungkin akan dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka secara layak. Hal itulah kiranya yang merupakan salah satu sebab terjadinya arus urbanisasi. Tabel 2 memperlihatkan, bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian menurun, yakni dari 64,16% dalam tahun 1971 menjadi 52,57% dalam tahun 1980. Di samping itu, persentase kenaikan kesempatan kerja di sektor pertanian sangat kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya, yaitu hanya 2,37%. Dari tabel itu juga terlihat, bahwa kenaikan jumlah penduduk yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, perdagangan, pengangkutan dan bangunan cukup banyak. Namun, jika hal itu dihubungkan dengan PDB per tiap orang buruhnya (lihat Tabel 3) dapat diduga bahwa mereka yang melakukan gerak sosial dari sektor pertanian ke sektor-sektor itu di kota-kota banyak yang kurang mempunyai keahlian dan ketrampilan. Besar kemungkinannya, bahwa mereka itu banyak yang menjadi pembantu rumah tangga, pedagang-pedagang kaki lima, tukang becak, sopir, kondektur dan pekerja-pekerja bangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama tahun 1971-1980 telah terjadi penyebaran setengah pengangguran dari sektor pertanian ke kota-kota. Hal itulah kiranya yang mengakibatkan masih tingginya tingkat setengah pengangguran di kota, yaitu sebesar 17,82%.

Tabel 6

PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA 1978-1980
(atas dasar harga konstan 1973)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan 1978-1980 (%)	Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun 1978-1980 (%)
1. Pertanian	13,10	4,19
2. Pertambangan	1,93	0,66
3. Industri	54,53	15,69
4. Listrik	57,99	16,50
5. Bangunan	32,46	9,85
6. Perdagangan	35,13	10,55
7. Pengangkutan	26,89	8,26
8. Keuangan	39,18	11,68
9. Sewa rumah	24,72	7,64
10. Pemerintahan dan pertahanan	40,09	12,08
11. Jasa-jasa	7,40	2,41
<i>PDB</i>	25,61	7,90

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 1982.

Tabel 2

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, 1971-1980

Lapangan Pekerjaan	1971		1980		Persentase Kenaikan 1971-1980
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1. Pertanian	26.473.477	64,16	27.102.600	52,57	2,37
2. Pertambangan	85.828	0,20	281.780	0,54	228,30
3. Industri	2.681.952	6,49	3.767.405	7,30	40,47
4. Listrik, gas, air	37.359	0,09	58.380	0,11	56,26
5. Bangunan	678.472	1,64	1.297.751	2,51	91,27
6. Perdagangan	4.261.561	10,32	5.684.659	11,02	33,39
7. Pengangkutan	951.354	2,30	1.302.857	2,52	36,94
8. Keuangan	93.462	0,22	262.740	0,50	181,11
9. Jasa kemasyarakatan	4.119.552	9,98	6.199.559	12,02	50,49
<i>Jumlah</i>	<i>41.261.216</i>	<i>100,00</i>	<i>51.553.122</i>	<i>100,00</i>	<i>24,94</i>

Sumber: BPS, *Statistik Indonesia 1975*;
BPS, *Sensus Penduduk 1980*, Seri S.2.

Tabel 3

PDB PER TIAP ORANG BURUH MENURUT LAPANGAN USAHA
(atas dasar harga konstan tahun 1973)

Lapangan Usaha	1978 (Rp)	1980 (Rp)	Persentase Kenaikan
1. Pertanian	99.370,00	122.140,00	22,91
2. Pertambangan	8.546.350,00	2.801.650,00	-67,21
3. Industri	320.470,00	390.900,00	21,97
4. Listrik	4.262.810,00	919.890,00	-78,42
5. Bangunan	656.270,00	406.380,00	-38,07
6. Perdagangan	198.520,00	280.100,00	41,09
7. Pengangkutan	399.040,00	415.180,00	4,04
8. Keuangan	3.855.250,00	895.940,00	-76,76
9. Jasa kemasyarakatan	46.420,00	40.220,00	-13,35
<i>Rata-rata</i>	<i>184.750,00</i>	<i>218.180,00</i>	<i>18,09</i>

Sumber: BPS, *Statistik Indonesia 1980-1981*;
BPS, *Statistik Indonesia 1982*;

ngan masalah kemiskinan, karena keahlian dan ketrampilan para penganggur pada umumnya rendah sehingga kemampuannya untuk mendapatkan penghasilan yang layak pun rendah pula. Oleh sebab itu masalah pengangguran tidak hanya berpengaruh pada bidang ekonomi saja, melainkan dapat berpengaruh pula pada bidang keamanan dan politik.

KEADAAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

Kalau kita mempelajari data angkatan kerja yang dihimpun oleh BPS, maka dapat ditarik beberapa pengertian mengenai masalah pengangguran: (1) data angkatan kerja tersebut terbagi dalam dua golongan, yakni mereka yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang termasuk sedang mencari pekerjaan dan tidak bekerja sama sekali adalah para penganggur terbuka atau penganggur penuh; (2) mereka yang bekerja minimum 35 jam seminggu termasuk bekerja penuh; (3) mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu adalah setengah pengangguran atau pengangguran terselubung.

Jika pengertian tersebut dipakai untuk menganalisa hasil Sensus Penduduk 1980, maka akan terlihat, bahwa: (1) jumlah pengangguran terbuka di negara kita sangat rendah, yaitu hanya 1,65%, tetapi jumlah pengangguran terbuka di kota lebih besar dibandingkan di pedesaan, yakni sebanyak 2,75%, sedangkan di pedesaan hanya 1,39%; (2) namun, jumlah angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau jumlah setengah penganggurannya relatif sangat besar, yaitu 35,91%, tetapi jumlah setengah pengangguran di kota lebih kecil dibandingkan di pedesaan, yakni hanya 17,82%, sedangkan di pedesaan sebanyak 40,18% (lihat Tabel 1).

Hasil Sensus Penduduk 1980, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 memperlihatkan, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor-sektor pertanian, jasa kemasyarakatan, perdagangan dan bangunan. Sektor-sektor tersebut dapat dikatakan masih bersifat tradisional dengan ciri utamanya lebih banyak bersifat informal dan kekeluargaan, dalam arti hubungan kerjanya sangat longgar serta para buruh atau karyawannya tidak digaji secara tetap dan kurang layak. Lapangan usaha seperti itu tidak menekankan pentingnya persyaratan keahlian dan ketrampilan, sehingga kesempatan kerja seseorang untuk memperoleh pekerjaan dalam sektor-sektor itu sangat besar. Dengan demikian, kedua data tersebut, terutama tingkat pengangguran terbuka yang sangat rendah dan setengah pengangguran yang besar dengan lapangan pekerjaan tersebut, berkorelasi erat, yakni rendahnya tingkat pengangguran terbuka di negara kita karena mudahnya seseorang mendapatkan pekerjaan pada sektor-sektor tradisional.

ungkinan pengembangan dan pengelolaan potensi laut/perikanan itu termasuk sarana-sarananya serta dampak-dampak positif dan negatifnya.

Dalam era pembangunan, pemerintah berusaha meningkatkan investasi sektor swasta dengan memberikan fasilitas dan keringanan kepada PMA dan PMDN. Dengan demikian usaha kecil dan koperasi seharusnya mudah berkembang. Karangan kelima yang berjudul "Sisi Lain dari Pengembangan Pengusaha Kecil/Koperasi" dan ditulis oleh Ahmad M. SAEFUDDIN secara khusus membahas kemungkinan pengembangan pengusaha kecil/koperasi itu sebagai unsur potensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar mengingat letak geografisnya, sebagai negara kepulauan dan kelautan yang beriklim tropis, serta potensi budayanya. Lagipula terdapat petunjuk bahwa kawasan Asia-Pasifik semakin menarik bagi arus wisatawan dunia. Namun jumlah wisatawan ke Indonesia relatif paling rendah di kalangan negara-negara ASEAN. Dalam karangannya yang berjudul "Mendayagunakan Potensi Pariwisata untuk Pembangunan Nasional," Sunarto NDARU MURSITO menyoroti masalah itu dan secara berturut-turut membahas industri pariwisata sebagai penghasil devisa, sektor pariwisata Indonesia dan ASEAN, dan pengembangan pariwisata menuju pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan.

Dalam karangan berikutnya, H. Anton DJAWAMAKU menyoroti profil pemogokan buruh Indonesia pada awal 1980-an. Pada masa ini buruh-buruh di beberapa perusahaan melakukan aksi pemogokan sehingga pemerintah mengambil tindakan terhadap mereka. Pemogokan umumnya bersifat spontan dan semata-mata dimaksudkan untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan nasib. Bentuk pemogokan memang dirasakan kurang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, namun perlu ditinjau motivasi serta sebab-sebabnya.

Karangan terakhir merupakan karangan pembandingan yang diambil dari Jon HALLIDAY, "The North Korean Model: Gaps and Questions," (World Development, 9, 1981), oleh Kirdi DIPOYUDO. Karangan ini membahas secara lengkap pembangunan dan partisipasi ekonomi di Korea Utara. Pembangunan negara ini cukup menarik karena berhasil menyerap seluruh tenaga kerja dan mencapai tingkat industri yang tinggi tanpa menggantungkan diri pada minyak dan sumber energi luar negeri. Hal itu dilakukan dengan sedikit bantuan luar negeri dan dewasa ini Korea Utara sedang memperluas perdagangannya dengan Jepang dan negara-negara OECD Eropa. Walaupun demikian perbedaan politik yang menyolok tidak memungkinkan pembangunan di Korea Utara itu dijadikan model pembangunan negara-negara lain.

PENGANTAR REDAKSI

Partisipasi ekonomi adalah salah satu masalah pokok dan mendesak di Indonesia. Melalui partisipasi ekonomi, seluruh penduduk dewasa yang mampu bekerja bisa diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi selain untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri juga untuk memperoleh pendapatan yang layak. Meluasnya pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat mencerminkan bahwa belum seluruh rakyat ikut serta secara penuh dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Berhubung dengan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, kebutuhan akan pekerjaan sebagai bentuk partisipasi ekonomi semakin meningkat. Selama Repelita III angkatan kerja diperkirakan naik dengan sekitar 6,5 juta jiwa, yaitu dari 54,8 juta jiwa pada tahun 1978 menjadi 61,3 juta jiwa pada tahun 1983 dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,2% setiap tahunnya. Dengan demikian tuntutan akan lapangan pekerjaan menjadi semakin besar. Di samping itu jumlah pengangguran masih besar, baik pengangguran penuh maupun tidak penuh yang terdiri atas mereka yang bekerja di bawah jam kerja yang seharusnya, mereka yang berpendapatan rendah, dan mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Data 1976, misalnya, menunjukkan bahwa mereka yang bekerja sepenuhnya hanya mencapai 23,7% atau sekitar 10 juta jiwa.

Oleh sebab itu pemerintah mencanangkan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan. Lagipula kebanyakan penduduk mengandalkan pekerjaan sebagai satu-satunya sumber pendapatan dan kesejahteraan. Dan perlu dicatat bahwa pekerjaan tidak hanya merupakan tugas pokok setiap warga negara, tetapi juga haknya. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Mengenai masalah tenaga kerja, sektor informal perlu mendapat perhatian yang khusus karena jumlah pekerja di sektor ini sangat besar dan umumnya

PENGANTAR REDAKSI

Partisipasi ekonomi adalah salah satu masalah pokok dan mendesak di Indonesia. Melalui partisipasi ekonomi, seluruh penduduk dewasa yang mampu bekerja bisa diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi selain untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri juga untuk memperoleh pendapatan yang layak. Meluasnya pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat mencerminkan bahwa belum seluruh rakyat ikut serta secara penuh dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Berhubung dengan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, kebutuhan akan pekerjaan sebagai bentuk partisipasi ekonomi semakin meningkat. Selama Repelita III angkatan kerja diperkirakan naik dengan sekitar 6,5 juta jiwa, yaitu dari 54,8 juta jiwa pada tahun 1978 menjadi 61,3 juta jiwa pada tahun 1983 dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,2% setiap tahunnya. Dengan demikian tuntutan akan lapangan pekerjaan menjadi semakin besar. Di samping itu jumlah pengangguran masih besar, baik pengangguran penuh maupun tidak penuh yang terdiri atas mereka yang bekerja di bawah jam kerja yang seharusnya, mereka yang berpendapatan rendah, dan mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Data 1976, misalnya, menunjukkan bahwa mereka yang bekerja sepenuhnya hanya mencapai 23,7% atau sekitar 10 juta jiwa.

Oleh sebab itu pemerintah mencanangkan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan. Lagipula kebanyakan penduduk mengandalkan pekerjaan sebagai satu-satunya sumber pendapatan dan kesejahteraan. Dan perlu dicatat bahwa pekerjaan tidak hanya merupakan tugas pokok setiap warga negara, tetapi juga haknya. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Mengenai masalah tenaga kerja, sektor informal perlu mendapat perhatian yang khusus karena jumlah pekerja di sektor ini sangat besar dan umumnya

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi

**Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
Pande Radja SILALAH
M. Hadi SOEASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
A. Sudiharto DJIWANDONO
Ronald NANGOI**

Redaksi Pelaksana

**Kirdi DIPOYUDO
Ronald NANGOI**

STT SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN 0126-222X

Alamat **Redaksi** : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489